

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian desa. Salah satu upaya yang terus digencarkan oleh pemerintah ialah membangun wilayah pedesaan lewat pemberdayaan warga guna tingkatkan produktivitas serta keanekaragaman usaha yang ada di desa. Dalam hal ini bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Bali yaitu dengan mengalokasikan dananya dalam program Gerbang Sadhu Mandara. Bantuan modal bergulir dari adanya program Gerbang Sadhu Mandara ini nantinya akan dialokasikan kepada masing-masing desa dan selanjutnya dana yang telah diterima akan disalurkan kembali kepada kelompok lembaga masyarakat yaitu BUMDes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes memaparkan jika BUMDes merupakan bentuk pendayagunaan desa yang dibangun oleh aparatur desa dimana penyertaan modal serta penyelenggaraannya dilaksanakan oleh aparatur desa serta penduduk desa. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk mewujudkan otonomi desa serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Apabila dilihat dari tujuan pendirian BUMDes tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga BUMDes dikatakan berhasil apabila dapat mencapai target maupun sasaran yaitu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa. Guna mencapai target maupun sasaran tersebut maka diperlukan adanya kolaborasi yang bersinergi antara apatur desa dengan warga desa. Adanya ketegasan dan juga keterampilan pemerintah dalam menggerakkan masyarakat

untuk ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diharapkan mampu menciptakan pengelolaan BUMDes yang baik sehingga tujuan serta target dari pendirian BUMDes dapat terealisasi.

Namun dibalik kerasnya usaha pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes, munculnya praktik- praktik kecenderungan kecurangan akuntansi masih banyak ditemukan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi sorotan yang menonjol baik dikalangan media pencari informasi dan juga dikalangan masyarakat. Dalam pengelolaan dana BUMDes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja dilakukan oleh individu-individu yang tidak konsekuen guna mendapatkan keuntungan untuk konsumsi pribadinya. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kompetensi pengelola BUMDes serta lemahnya pengendalian internal sehingga menyebabkan ketidakefektifan serta ketidakefisienan dalam pengelolaan dana BUMDes yang berdampak pada pemborosan anggaran dalam dana desa.

Terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes di Indonesia yaitu diantaranya : (1) Adanya dugaan monopoli yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukawan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak terhadap pengelolaan dana BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian 50 juta (sumber : Tiktinol.co.id), (2) Penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian Rp 55 juta dengan tersangka utama Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal (sumber : startfmmadina.com), (3) Penggunaan dana BUMDes yang bersumber dari dana desa untuk kepentingan pribadi dengan total 30 juta oleh Kepala Desa Ciaro tahun 2017 (sumber : sorotinindonesia.com), (4) Penyalahgunaan wewenang

serta pidana korupsi Kepala Desa serta Ketua BUMDes Desa Bingkat, Sumatera Utara dengan total kerugian Rp 100 juta pada tahun 2018 (sumber : indahsuaranews.com), (5) Penyelewengan dana pendapatan BUMDes Maribaya dengan total kerugian 800 juta pada tahun 2019 (sumber : satelit post.com)

Kabupaten Buleleng menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jumlah BUMDes terbanyak yang ada di provinsi Bali dengan total 112 unit BUMDes yang tersebar di Sembilan (9) kecamatan yang ada di Buleleng. Dilansir dari <https://bali.antarane.ws.com> BUMDes beromset besar mulai berkembang di Buleleng, hal ini dibuktikan dengan pencapaian BUMDes dengan omset terbesar di daerah pesisir utara pulau Bali yang dimiliki oleh BUMDes Tajun dan BUMDes Tunjung di Kecamatan Kubutambahan. Namun dari perkembangan BUMDes yang pesat di kabupaten Buleleng terdapat 3 BUMDes yang bermasalah, yaitu 2 BUMDes yang terdapat di kecamatan Busungbiu dan 1 BUMDes di kecamatan Gerogak.

Kecamatan Busungbiu merupakan kecamatan dengan jumlah BUMDes bermasalah terbanyak di Kabupaten Buleleng dengan total 2 Kasus yaitu Kasus BUMDes Pucaksari dan Kasus BUMDes Bengkel. Dilansir dari <https://beritadewata.com> penyebab dari bermasalahnya dua BUMDes di kecamatan Busungbiu yaitu karena adanya indikasi kecurangan dari pihak pengelola operasional BUMDes dengan cara membuat laporan fiktif pada pertanggungjawaban BUMDes dengan total kerugian mencapai Rp 436 juta. Sedangkan salah satu BUMDes yang bermasalah di kecamatan Gerogak yaitu BUMDes Patas. Dilansir dari [www.balitribunews.com](http://www.balitribunews.com) penyebab dari bermasalahnya BUMDes Patas yaitu karena beberapa pengurus diketahui menilep

dana BUMDes dengan cara mengajukan pinjaman tanpa agunan dengan total kerugian Rp 465 juta untuk kepentingan pribadi.

Banyaknya muncul kasus-kasus penyelewengan dana BUMDes dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Faktor pertama yang diduga mendorong munculnya kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan dana BUMDes adalah rendahnya kompetensi pengelola. Kompetensi yang dimiliki pengelola BUMDes dalam melakukan pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk mampu mencapai tujuan ekonomi serta tujuan sosial bagi masyarakat.

Spencer dan Spencer (2008) menyatakan bahwa kompetensi merupakan faktor penting yang digunakan untuk mencegah *fraud*. Tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pengelola BUMDes sangat penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan apabila pengelola BUMDes tidak memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melakukan pekerjaannya, maka akan berdampak tidak baik pada kinerja yang telah dilaksanakan, serta turut berdampak pada munculnya praktik kecurangan atau manipulasi. Sistem maupun prosedur kerja yang sebaik apapun tidak akan sejalan apabila individu dalam hal ini pengelola yang melaksanakannya tidak mempunyai kompetensi yang diperlukan dalam menunjang pekerjaannya. Guna mengatasi hal tersebut maka sangat perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kompetensi yaitu mencakup pengetahuan maupun keahlian yang dimiliki oleh pengelola BUMDes untuk dapat mengerjakan pekerjaannya secara maksimal. Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Philep Njonjie, dkk (2012) menyatakan jika kompetensi pengelola yang kurang maksimal akan mempengaruhi munculnya praktik manipulasi laporan keuangan

Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Wirakusuma serta Setiawan (2019) menunjukkan jika kompetensi pengelola memiliki pengaruh negatif dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil tersebut mengindikasikan jika kompetensi yang dimiliki pegawai semakin tinggi maka semakin kecil upaya untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Komponen kedua yang diduga memiliki hubungan terhadap munculnya kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes yaitu ketidakefektifan pengendalian internal. Apabila suatu lembaga memiliki pengendalian internal yang efektif maka lebih cepat dalam mengetahui munculnya kecurangan dibandingkan lembaga yang tidak efektif dalam pengendalian internalnya, sehingga pihak dalam maupun pihak luar organisasi akan sulit untuk melakukan tindakan kecurangan. Kaukab dan Damayanti (2015) menguraikan jika pengendalian internal ialah salah satu metode untuk menghindari *fraud* serta memberikan proteksi untuk organisasi terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kesalahan dan aksi yang tidak cocok dengan ketentuan ataupun kaidah. Cut Syafira dan Rachmawati (2016) dalam penelitiannya juga memaparkan jika pengendalian internal yang belum maksimal mampu memunculkan adanya kecurangan akuntansi.

Selain itu penelitian yang dilakukan Atmadja serta Saputra (2017) memaparkan apabila tindakan kecurangan menunjukkan tidak terjadinya sinergisme antara keefektifan sistem pengendalian internal serta kompetensi pengelola dalam melakukan pencegahan kecurangan (*fraud*). Kemudian Putri (2018) juga menyatakan apabila sistem pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Apabila pengendalian internal

semakin baik, upaya untuk melakukan kecenderungan kecurangan akan semakin kecil. Namun hal berbeda di sampaikan oleh Klara Wonar (2018) dalam penelitiannya memaparkan jika pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap niat untuk melakukan tindakan *fraud*.

Selain kompetensi pengelola dan keefektifan pengendalian internal, hal lain yang berdampak pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) yaitu kesesuaian kompensasi. Adinda (2015) menyatakan jika kompensasi merupakan bentuk imbalan serta balas jasa bagi karyawan agar memacu semangat kerja guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Dengan diberikannya kompensasi, para pegawai merasa terpacu untuk meningkatkan semangat kerja guna memperoleh imbalan yang ditawarkan. Akan tetapi apabila imbalan yang didapatkan tidak sebanding atas usaha yang dikeluarkan maka akan memunculkan persepsi ketidakadilan dalam kompensasi tersebut. Hal inilah yang menjadi akibat munculnya persepsi pegawai apabila imbalan yang diterima tidak searah dengan usaha yang dikeluarkan, kemudian akhirnya mendorong pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*). Penelitian yang dilakukan Adni dan Alou *et al* (2017) serta Karsyam Sunaryo (2019) membuktikan jika kesesuaian kompensasi berdampak signifikan positif dengan kecendrungan kecurangan akuntansi. Hasil ini menunjukkan jika semakin tinggi kompensasi maka semakin tinggi pula tanggungjawab dan kewenangan pegawai tersebut sehingga akan cenderung lebih berpeluang melakukan tindakan kecurangan. Namun hasil yang berbeda disampaikan Zulkarnain (2013), yaitu dengan diberikannya kompensasi yang sesuai dengan kemampuannya maka akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pegawai sehingga tindakan untuk melakukan kecurangan dapat dihindarkan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Wirakusuma dan Setiawan (2019) dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Pengelola dan *Locus Of Control* Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kompetensi pengelola sebagai variabel bebas. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada penelitian Karsyam Sunaryo, dkk (2019) dengan judul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi, Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Dimana persamaan penelitian ini yaitu menggunakan kesesuaian kompensasi dan keefektifan pengendalian internal sebagai variabel bebas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, terdapat perbedaan proksi variabel yang diteliti. Pada penelitian ini mengkombinasikan variabel kompetensi pengelola, keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi. Variabel keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi diteliti kembali karena adanya inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kedua penggunaan populasi dan sampel serta lokasi penelitian yang berbeda. Dimana penelitian menggunakan populasi dan sampel pengelola pada sektor BUMDes dan penelitian ini dilakukan pada BUMDes se-Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan BUMDes bentukan Gerbang Sadhu Mandiri (GSM) sebagai objek dalam penelitian ini yang mana kebanyakan penelitian terdahulu lainnya menggunakan objek BUMDes bentukan Kementerian Desa (Kemendes). Hal ini dilihat sebagai suatu kebaruan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, BUMDes bentukan GSM juga digunakan karena beberapa kasus kecurangan BUMDes yang

terjadi di Kabupaten Buleleng seperti BUMDes Busungbiu dan BUMDes Patas merupakan BUMDes bentukan GSM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi Pengelola, Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana BUMDes”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terungkapnya kasus kecurangan BUMDes Pucakasari dan BUMDes Bengkel di Kecamatan Busungbiu. Dilansir dari <https://beritadewata.com> penyebab dari bermasalahnya BUMDes di kecamatan Busungbiu yaitu karena adanya indikasi kecurangan dari pengelola operasional BUMDes yaitu dengan membuat laporan fiktif pada pertanggungjawaban BUMDes.
2. Adanya temuan kasus kecurangan BUMDes di desa Patas, kecamatan Gerogak. Dilansir dari [www.balitribunenews.com](http://www.balitribunenews.com) penyebab dari bermasalahnya BUMDes Patas yaitu karena beberapa pengurus menilep dana BUMDes dengan cara mengajukan pinjaman tanpa anggunan.
3. Masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh masing-masing proksi variabel yaitu variabel keefektifan pengendalian internal serta variabel kesesuaian kompensasi dalam penelitian berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pembatasan masalah sangat diperlukan dalam penelitian ini agar lebih berfokus pada beberapa masalah yang diidentifikasi dan terarah pada penggunaan variabelnya. Fokus penelitian ini yaitu pengaruh kompetensi pengelola, keefektifan pengendalian internal serta kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pengelola terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes?
2. Apakah terdapat pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes?
3. Apakah terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengelola terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes.
2. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperoleh ilmu berkaitan terhadap aspek-aspek yang memunculkan kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana BUMDes utamanya faktor kompetensi pengelola, keefektifan pengendalian internal serta kesesuaian kompensasi

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BUMDes, penelitian ini berguna untuk menjadi informasi sumbangan saran serta pikiran kepada pihak BUMDes terkait dengan aspek-aspek yang berdampak terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan Dana BUMDes
- b. Bagi akademik, penelitian ini dapat bermanfaat untuk akademisi, mencakup dosen serta mahasiswa dalam upaya menyampaikan informasi serta pengetahuan untuk kegiatan pembelajaran guna mengetahui aspek-aspek yang mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana BUMDes
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi aspek pembanding guna memperoleh ilmu pengetahuan terkhusus bagi kelompok- kelompok yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.